

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan upaya untuk memilih pemimpin atau memilih wakil-wakil rakyat. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang dibagi dalam dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa (Budiarjo 2008). Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya (Lutpiani 2021). Dalam menjalankan proses demokrasi, diperlukan suatu sistem pemilihan yang berfungsi untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Pemilu menjadi cara untuk memilih pemimpin ataupun wakil rakyat. Pemilu di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Pada saat itu pemilu dilakukan dua kali, pemilu yang pertama dilakukan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Widianingsih 2019). Seiring berjalannya waktu pemilu di Indonesia ini bertransformasi dari awalnya hanya memilih Anggota DPR, MPR, dan Konstituante menjadi Memilih calon Presiden dan wakil Presiden, Anggota Legislatif, (DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, DPD).

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, khususnya pemilu legislatif, menjadi ajang kompetisi yang melibatkan berbagai calon dengan latar belakang

yang berbeda. Pemilihan umum legislatif (Pileg) merupakan salah satu bagian dari pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum serentak kelima di Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024. Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pemilu 2024 ini menjadi salah satu agenda politik terbesar di Indonesia, dikarenakan dalam Pemilu 2024 ini tidak hanya memilih Anggota legislatif, tetapi juga memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu legislatif (Pileg) jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah 20.614 kursi. Terkhusus untuk kursi di DPR RI ada 580 kursi yang diperebutkan dengan kuota kursi setiap partai yaitu

Tabel 1. 1 Kuota Kursi Yang didapatkan Oleh Setiap Partai di DPR RI

NO	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai PDI-P	110 Kursi
2.	Partai Golkar	102 Kursi
3.	Partai Gerindra	86 Kursi
4.	Partai Nasdem	69 Kursi
5.	Partai PKB	68 Kursi
6.	Partai PKS	53 Kursi
7.	Partai PAN	48 Kursi
8.	Partai Demokrat	44 Kursi

(Sumber Data Sekunder Kompas.com 2024)

Sedangkan Partai PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Partai Buruh, Partai UMMAT, PBB, Partai Garuda, dan PKN tidak memiliki kuota kursi di DPR RI (Kompas.com 2024).

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat (Sigit Pamungkas 2009). Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrument penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih wakilnya. Pemilu juga merupakan ajang kontestasi politik yang tidak hanya menjadi ajang perebutan suara, tetapi juga bagaimana refleksi kekuasaan dijalankan, diperebutkan, dan dipertahankan oleh para aktor-aktor politik. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis, dinamika politik lokal semakin menarik untuk dianalisis, terutama dengan munculnya berbagai calon legislatif yang mengusung visi dan misi yang berbeda. Salah satu figure yang menarik perhatian yaitu Ir. H. Herry Dermawan, yang merupakan legislatif terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2024.

Herry Dermawan merupakan anggota DPR RI Komisi IV dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Beliau lahir di Sidoarjo pada 30 Maret 1960. Sebelum terjun ke dunia politik Herry Dermawan ini bekerja di PT Bamaindo dari tahun 1985 sampai 1992. Di PT Bamaindo ini, Herry Dermawan menjadi technical service, Supervisor, dan terakhir menjadi marketing manager, sebelum pindah ke

Rinjani PS pada tahun 1993. Pada Pemilu tahun 2024 Herry Dermawan ini terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran). Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 Herry Dermawan merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari hasil pemilu legislatif pada tahun 2019 (DPRD Provinsi) Herry Dermawan ini memiliki suara paling banyak di Partai Amanat Nasional.

Tabel 1. 2 Hasil Recap Pemilu Legislatif (DPRD Provinsi) Tahun 2019

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1	Ir. H. HERRY DERMAWAN	33.304
2	SALIMUN SIREMA	2.358
3	DEWI SITI NURJANNAH	2.976
4	H. MAMAN WIJAYA	1.641
5	NENDEN DIANA	2.239
6	IMAS ROHMAYANTI	597
7	LINA APRIANI, S. S	490
8	MUHAMAD AGUSTIANA	469

(Sumber Data Sekunder KPU Ciamis tahun 2019)

Legislatif Terpilih sebenarnya jika dilihat dari aspek manapun sudah memiliki suara yang banyak sejak pemilu legislatif (DPRD Provinsi) tahun 2019 di Partai Amanat Nasional. Data menunjukan bahwa Herry Dermawan sebenarnya memiliki modal untuk melanjutkan ke Tingkat nasional pada pemilu 2024. Beliau memiliki suara terbanyak sebesar 33.304 suara mengalahkan kader-kader Partai Amanat Nasional lainnya, dan dapat dikatakan juga bahwasannya Herry Dermawan ini sudah dapat menarik perhatian dari sejak tahun 2019.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada Tenaga Ahli bapak Herry Dermawan beliau menjelaskan bahwasannya Pada tahun 2024 beliau memutuskan untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR RI setelah cukup memiliki pengalaman selama 2 periode di DPRD Provinsi. Terbukti pada pemilihan umum 2024 beliau terpilih menjadi anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Partai PAN khususnya di dapil X mengalahkan Kandidat lain. Di dapil X Jawa Barat kontestasi Pemilu Legislatif diikuti oleh 18 Parpol dengan total 119 orang yang ikut mencalonkan dalam Pemilu DPR RI tahun 2024, dari partai PAN sendiri perolehan suara beliau mengungguli kandidat lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil recap dari KPU Kabupaten Ciamis.

Tabel 1. 3 Hasil Recap Pemilu Legislatif (DPR RI) Tahun 2024 Partai Amanat Nasional

No.	Nama Calon	Jumlah Suara
1	Dipo Nurhadi Ilham, S.E., M.M., M.B.A.	4.564
2	Ir. H. Herry Dermawan	26.113
3	Sucianti Nur Rahmawinata	1.420
4	Aan Hanafi, S.Ag.	857
5	Mohamad Alwan Pramedisca, S.Ked.	693
6	Hj. Ela R., A.Md.Kep	282
7	Anna Diana Sari	328

(Sumber Data Sekunder KPU Ciamis Tahun 2024)

Dari tabel tersebut dapat kita lihat suara Herry Dermawan memiliki suara paling banyak dengan 26.113 suara. Dan beliau ini merupakan pendatang baru

dalam pemilihan umum legislatif DPR RI. Beliau lolos menjadi anggota DPR RI dengan total keseluruhan suara di Dapil X Jawa Barat 47.460 suara berdasarkan hasil recap KPU. Di dapil X Jawa Barat ini terdapat 7 orang yang lolos menjadi anggota legislatif yaitu sebagai berikut

Tabel 1. 4 Hasil Recap Pemilu Legislatif (DPR RI) Tahun 2024 Partai Amanat Nasional

No.	Nama Calon	Jumlah Suara
1.	Rokhmat Ardiyan (Gerindra)	104.307
2.	Ida Nurlela Wiradinata (PDI-P)	66.040
3.	Agun Gunanjar Sudarsa (Golkar)	61.935
4.	Rina Sa'adah (PKB)	59.992
5.	Surahman Hidayat (PKS)	71.497
6.	Herry Dermawan	47.460
7.	Shohibul Imam	56.776

(Sumber Data Sekunder KPU Ciamis Tahun 2024)

Herry Dermawan ini lolos di peringkat ke 6 di Dapil X Jawa Barat. Dan suara beliau lebih dari 50 persen didapatkan di Kabupaten Ciamis. Tentu hal ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa saja, memerlukan banyak elemen yang terlibat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis elemen apa saja yang terlibat dalam kemenangan Herry Dermawan pada pemilu legislatif tahun 2024 terkhusus di Kabupaten Ciamis ditinjau dari perspektif power cube yang dicetuskan oleh John Gaventa.

Pada penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan (Dewanti, Al-Hamdi, and Efendi 2022), menyoroti tentang faktor faktor yang menyebabkan kekalahan Agus Sulistiyono sebagai calon legislatif petahana PKB pada Pemilu 2019 di Dapil DIY dengan menggunakan Teori *Power cube*. Penelitian yang dilakukan oleh Mike Dewanti dkk. (2022) dalam jurnal *Politik Profetik* berjudul "Kekalahan Petahana pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa" menganalisis kekalahan Agus Sulistiyono, seorang calon legislatif petahana dari PKB di Daerah Pemilihan DIY pada Pemilu 2019. dua faktor utama penyebab kekalahan petahana adalah kekuasaan terlihat (*visible power*) dan kekuasaan tersembunyi (*hidden power*).

Selanjutnya penelitian dari (Haryanto 2021) Petahana Independen dalam Perspektif Powercube Penelitian ini menganalisis fenomena politik pasangan petahana Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah dalam Pilkada Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020. Menariknya, pasangan ini maju melalui jalur independen, padahal mereka merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendominasi politik lokal. Dari dimensi level, ditemukan bahwa konflik internal dan faksionalisme dalam tubuh PAN, baik di tingkat nasional maupun lokal, memengaruhi keputusan Romi untuk mengambil jalur independen. Di dimensi ruang, Romi menciptakan ruang tertutup dengan menghimpun dukungan KTP tanpa sepengetahuan elit partai, menunjukkan manuver politik yang bersifat eksklusif dan penuh perhitungan. Dalam *hidden power*, ia memengaruhi elit lokal dan bahkan partai-partai besar seperti PAN dan Golkar, yang akhirnya justru memberikan dukungan meskipun ia maju tanpa partai.

Sementara itu, *invisible power* terlihat dari keberhasilannya membangun kedekatan emosional dan kultural dengan masyarakat serta tokoh agama yang memainkan peran penting dalam memperkuat loyalitas pemilih.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh (Aninditya Normalitasari 2017) dengan judul Hegemoni Rezim Politik Ranah Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Pati di Bawah Kepemimpinan Haryanto, penelitian ini menggunakan teori power cube untuk melihat bagaimana fenomena hegemoni rezim politik di ranah lokal terjadi dan hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya rezim politik lokal di kabupaten Pati tidak bisa dilepaskan dari aktor lokal baik formal maupun informal. Aktor formal seperti DPRD dan Forkopimda yang memiliki legal dalam struktur pemerintahan sedangkan aktor informal yaitu tokoh Masyarakat dan tokoh agama. Dalam praktiknya, hubungan antara aktor formal dan informal ini terjalin dalam ruang-ruang kekuasaan yang tertutup, di mana kesepakatan-kesepakatan politik sering terjadi secara informal dan tidak transparan. Kesepakatan ini meliputi praktik jual beli jabatan dan politik balas budi, yang kemudian memengaruhi kebijakan dan struktur birokrasi setelah pasangan calon terpilih.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Erviantono dan Noak 2025) dengan judul Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika relasi kuasa antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya Front Betawi Bersatu (FBB), dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Jakarta selama masa pandemi Covid-19. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, serta

memanfaatkan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori *Powercube* dari John Gaventa sebagai kerangka analisis. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam perspektif Foucault, relasi kuasa antara pemerintah dan FBB tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan penuh resistensi. FBB menunjukkan *counter-conduct* dengan mengadvokasi transparansi data dan bertindak sebagai aktor penting dalam masyarakat sipil. Sementara itu pada kerangka *Power Cube* John Gaventa, FBB memanfaatkan ketiga bentuk kekuasaan, yang pertama ada *visible power* melalui partisipasi dalam ruang diskusi dan pengaruh opini publik, selanjutnya *hidden power* melalui jejaring relawan dan pengorganisasian isu-isu sosial dan yang terakhir dari *Invisible Power* dengan membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang hak-hak Perempuan

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Pandangai 2023) dengan judul Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran Belanja Daerah, Penelitian ini mempertegas bahwa dinamika politik lokal, khususnya dalam isu pemekaran wilayah, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui institusi formal, melainkan juga melalui relasi informal dan simbolik yang membentuk struktur *hidden power*. dengan demikian pemahaman terhadap kekuasaan dalam politik lokal harus memperhitungkan aspek-aspek yang tidak tampak secara langsung, namun sangat menentukan arah kebijakan dan Keputusan politik di daerah.

Kelima penelitian terdahulu yang diambil penulis sama-sama menggunakan Teori *Power Cube* Menurut John Gaventa. Dikarenakan menggunakan teori *Power Cube* sebagai kerangka analisisnya juga, dianggap relevan dalam memaknai

kekuasaan dalam konteks politik lokal melalui proses demokratisasi di daerah dan dirasa relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini, hanya memiliki beberapa perbedaan saja. Faktor yang mempengaruhi kemenangan calon kontestan diantaranya adalah pengoperasian bentuk-bentuk kekuasaan yang dilakukan (Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati 2018). Bentuk-bentuk kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan yang terlihat (*visible power*), tidak terlihat (*invisible power*) dan tersembunyi (*hidden power*) dengan dalam prespektif teori kubus kekuasaan (*Powercube*) (Gaventa dalam Halim, 2014). Dalam menganalisis dimensi kekuasaan dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Ciamis tahun 2024, khususnya yang melibatkan Herry Dermawan sebagai legislatif DPR RI terpilih dari partai PAN, pendekatan teori *Power cube* yang dikembangkan oleh John Gaventa menjadi sangat relevan. Teori ini membantu kita memahami relasi kekuasaan berdasarkan tiga dimensi utama. Dimensi yang dimaksud ialah Dimensi tingkatan, Dimensi Ruang dan Dimensi Bentuk. Menurut Gaventa dalam (Halim, 2014) Kubus kekuasaan merupakan salah satu faktor kemenangan kandidat dalam kontestasi politik. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa pengoperasian bentuk-bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh Herry Dermawan ini bisa jadi merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam memenangkan kontestasi politik pada pemilu legislatif 2024. Maka dalam penelitian yang berjudul Dimensi Kekuasaan dalam Kontestasi Politik Lokal (Analisis Teori *Power Cube* Pada Herry Dermawan Pada Pemilu Kabupaten Ciamis 2024) ini akan dianalisis bagaimana profil kubus kekuasaan dari Herry Dermawan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan yaitu Bagaimana dimensi Kekuasaan dalam kontestasi politik lokal khususnya yang dilakukan oleh legislatif terpilih Ir. H. Herry Dermawan pada pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis berdasarkan prespektif teori *Powercube*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapat dari rumusan masalah yaitu, Mengetahui ataupun mengungkap dan mendeskripsikan Dimensi Kekuasaan dalam kontestasi politik lokal khususnya dilakukan oleh legislatif terpilih Herry Dermawan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis berdasarkan prespektif teori *Powercube*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, baik secara teoritis maupun praktis. adapun manfaat yang dimaksud sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada penguatan dan pengujian *Teori Power Cube* yang dikembangkan oleh John Gaventa, khususnya dalam konteks kajian Ilmu politik lokal di Indonesia. Dengan menganalisis tiga

dimensi kekuasaan Sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan pada kajian ilmu tentang teori kubus kekuasaan

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut

- a. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana pengoperasian dimensi bentuk dalam kontestasi politik lokal khususnya dilakukan oleh legislatif terpilih Ir. H. Herry Dermawan pada pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis berdasarkan prespektif teori *Powercube*
- b. Manfaat bagi Masyarakat yaitu dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengoperasian dimensi bentuk dalam kontestasi politik lokal khususnya dilakukan oleh legislatif terpilih Ir. H. Herry Dermawan pada pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis berdasarkan prespektif teori *Powercube*